

**IMPLEMENTASI HAK JAWAB DALAM JURNALISME TELEVISI
(STUDI PELAKSANAAN PASAL 5 UU NO 40 TAHUN 1999 TENTANG
PERS DI TVRI JAWA BARAT)**

Oleh:

SEPTIAN MAHADANA JAYA

NIM: E1A019127

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara yang mengakui kemerdekaan pers sebagai salah satu perwujudan kedaulatan rakyat. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menjadi landasan hukum bagi pers nasional dalam melakukan aktivitas jurnalistik. Penelitian ini akan menganalisa bagaimana implementasi hak jawab yang dilakukan oleh Televisi Republik Indonesia (TVRI) di Jawa Barat sebagai salah satu jenis media massa yang berperan menyampaikan pesan (berita, informasi dan hiburan) kepada masyarakat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosio-legal. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat dua alur dalam pelaksanaan hak jawab di TVRI Jawa Barat, yakni pengaduan melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan juga pengaduan melalui media sosial resmi milik TVRI Jawa Barat. Aduan yang diterima akan diproses dalam sebuah rapat internal bernama Forum Perencanaan Siaran (FOPERSI). Dalam implementasi hak jawab di TVRI Jawa Barat, terdapat kendala regenerasi sumber daya manusia yang lambat. Untuk menangani kendala ini, TVRI Jawa Barat mengirim para staf baru untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) di Pusat Pendidikan dan Pelatihan (PUSDIKLAT). Implementasi hak jawab di TVRI Jawa Barat telah dilakukan sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (2) UU Pers dengan diprosesnya pengajuan hak jawab yang diterima oleh TVRI Jawa Barat, Meskipun terdapat kendala dalam proses implementasi hak jawab di TVRI Jawa Barat.

Kata kunci: Implementasi Hak Jawab, Televisi, Hak Jawab

**IMPLEMENTATION OF THE RIGHT OF REPLY IN TELEVISION
JOURNALISM**

**(Study of the Application of Article 5 of Law No. 40 of 1999 concerning The Press
on TVRI Jawa Barat)**

By:

SEPTIAN MAHADANA JAYA NIM:

E1A019127

ABSTRACT

Indonesia recognizes press freedom as one of the embodiments of people's sovereignty. Law Number 40 of 1999 concerning the Press serves as the legal foundation for the national press in carrying out journalistic activities. This study shows how the right of reply is implemented by Televisi Republik Indonesia (TVRI) in West Java as one of the mass media responsible for conveying messages (news, information, and entertainment) to the public. The research methodology used in this study is a socio-legal approach. The results of this research indicate that there are two channels for the exercise of the right of reply at TVRI West Java, namely through complaints filed with the Information and Documentation Officer (PPID) and also through official social media channels owned by TVRI West Java. The received complaints are processed in an internal meeting called the Broadcast Planning Forum (FOPERSI). In the implementation of the right of reply at TVRI West Java, there is an issue in the slow regeneration of human resources. To address this issue, TVRI West Java sends new staff for Education and Training (DIKLAT) at the Center for Education and Training (PUSDIKLAT). The implementation of the right of reply at TVRI West Java has been carried out in accordance with what is stipulated in Article 5, paragraph (2) of the Press Law, by processing the received right of reply submissions, despite issue in the implementation process at TVRI West Java.

Keyword: Implementation of Right of Reply, Television, Right of Reply